

Tantangan dan Strategi Inovatif Pendidikan Kewarganegaraan pada Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) Indonesia

Joseph Arie Ochtsan Rambe Simamora¹ T Heru Nurgiansah²

Program Studi Teknologi Rekayasa Material Maju, Jurusan Teknik Pengecoran Logam,
Politeknik Manufaktur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Email: josephsimamora727@gmail.com¹

Abstrak

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang luas. Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan signifikan dalam pemerataan akses serta kualitas pendidikan, terutama di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sebagai pilar pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan, memegang peranan yang sangat krusial di wilayah-wilayah strategis ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika utama serta merumuskan strategi pembelajaran PKn yang efektif untuk diterapkan di daerah 3T. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur (*literature review*), dengan cara menganalisis berbagai dokumen hukum, artikel ilmiah, dan buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama meliputi keterbatasan kualitas dan kuantitas guru, minimnya infrastruktur dan media pembelajaran, serta tantangan geografis yang unik. Sebagai solusinya, penelitian ini menyimpulkan strategi yang inovatif seperti optimalisasi dengan pendekatan pembelajaran kelas rangkap (PKR), penerapan metode *Contextual Teaching and Learning* (CTL), serta penggunaan *story telling* untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara efektif di tengah keterbatasan yang ada.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Daerah 3T, Inovasi Pembelajaran, Pemerataan Pendidikan

Abstract

Indonesia is a vast archipelagic country. Currently, Indonesia is facing significant challenges in equalizing access and quality of education, especially in the Frontier, Outermost, and Disadvantaged Regions (3T). Civic Education (PKn), as a pillar of character building and national insight, plays a crucial role in these strategic areas. This study aims to identify key issues and formulate effective PKn learning strategies for implementation in 3T areas. This research was conducted using a literature review approach, analyzing various legal documents, scientific articles, and relevant books. The results indicate that the main issues include limited teacher quality and quantity, minimal infrastructure and learning media, and unique geographical challenges. As solutions, this study concludes with innovative strategies such as optimizing the multigrade learning approach (PKR), implementing the Contextual Teaching and Learning (CTL) method, and using storytelling to effectively instill national values amidst existing limitations.

Keywords: Civic Education, 3T Regions, Learning Innovation, Educational Equity



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kondisi geografis Indonesia yang khas sebagai negara kepulauan di persilangan dunia menjadikan negara ini memiliki nilai yang strategis yang tinggi secara geopolitik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, wilayahnya terbentang luas dengan lebih dari 17.000 pulau yang dirangkai oleh lautan, selat, dan teluk (UU No.43 TH 2008, n.d.). Kondisi yang unik ini menciptakan sebuah konsepsi fundamental yang dikenal sebagai “Wawasan Nusantara”, yaitu cara pandang bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan (Ismail et al., 2024). Namun, kondisi geografis negara ini secara inheren menciptakan tantangan pembangunan yang luar biasa. Adanya jurang kemajuan yang nyata antara wilayah yang maju dengan wilayah yang terpencil

(seperti pada daerah perbatasan dan/atau pedalaman) merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan seksama dan bijaksana. Sebagai respons atas fenomena ini, pemerintah dan masyarakat mengklasifikasikan wilayah-wilayah tersebut ke dalam kategori Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Berdasarkan hukum, kategorisasi daerah 3T bukan hanya sekadar label saja, melainkan hal ini menjadi sebuah instrumen kebijakan untuk mengakselerasi pembangunan. Daerah Terdepan dan Terluar (3T), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Wilayah Negara, merupakan beranda bangsa yang memiliki signifikansi strategis bagi pertahanan dan kedaulatan (*UU No.43 TH 2008*, n.d.). Sementara itu, Daerah Tertinggal, berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020, didefinisikan sebagai suatu kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Penetapan ini bukan juga tanpa dasar, hal ini diukur melalui serangkaian kriteria dan indikator yang komprehensif, yang telah dirancang sebelumnya. Kriteria tersebut mencakup enam aspek utama, yaitu: (1) perekonomian masyarakat; (2) kualitas sumber daya manusia; (3) sarana dan prasarana; (4) kemampuan keuangan daerah; (5) aksesibilitas; dan (6) karakteristik daerah (*Permendesa Nomor 11 Tahun 2020*, n.d.). Indikator-indikator yang sudah ada selanjutnya dapat dipecah menjadi variabel terukur seperti untuk produk domestik regional bruto per kapita, angka partisipasi sekolah di jenjang SMP dan SMA, persentase desa yang memiliki akses mudah ke fasilitas kesehatan, kondisi infrastruktur dasar seperti jalan beraspal, dan lain-lain. Munculnya daerah 3T merupakan akumulasi dari berbagai faktor historis dan struktural, yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat di sana seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dimana salah satu sektor yang terdampak adalah pada layanan pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan di Indonesia adalah hal yang fundamental. Selain karena diperintahkan oleh negara, pendidikan juga merupakan jalan utama bagi siapa saja untuk bisa mengangkat derajat dan memperbaiki nasib. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan luhur dari negara ini, sehingga negara wajib menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan yang layak. Tindakan menjamin semua khalayak di daerah 3T mendapat kesempatan pendidikan yang setara adalah implementasi paling praktis dari prinsip "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (Vega, 2024). Sehingga, peran pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi sentral. Pendidikan Pancasila adalah sebuah media atau wahana untuk menanamkan dan mengintergrasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup (*Weltanschauung*), dan ideologi nasional. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter, moralitas, dan kepribadian peserta didik agar beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada keharmonisan kehidupan berbangsa (*8-PendidikanPancasila*, n.d.). Sementara itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan arena aplikasi dari nilai-nilai tersebut dalam konteks kehidupan berdemokrasi (kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat). PKn secara spesifik membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan partisipatif sesuai dengan amanat UUD 1945 (*9-PendidikanKewarganegaraan*, n.d.). Jika Pendidikan Pancasila berkaitan dengan fondasi "nilai", maka PKn adalah sebuah pilar implementasinya atau penerepannya. Keduanya bersinergi untuk membentuk "warga negara yang cerdas dan baik" (*smart and good citizen*).

Urgensi kedua pilar pendidikan ini terasa semakin krusial ketika ditempatkan dalam konteks daerah 3T di Indonesia. Karena posisinya di perbatasan fisik dan ideologis, wilayah-wilayah ini menjadi arena pertarungan nasionalisme. Di tengah deras arus dari globalisasi,

generasi muda di daerah 3T sangat rentan terhadap erosi atau penurunan nilai-nilai kebangsaan (Nurgiansah & Rachman, 2022). Oleh karena itu, pembelajaran PKn yang efektif memiliki fungsi sebagai benteng pertahanan ideologis, menanamkan rasa cinta tanah air, dan memperkuat sikap patriotisme (Pradita, 2017). Namun, keberhasilan dari nilai-nilai ini sangat bergantung pada satu figur sentral dalam dunia Pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya figur yang ada di sekolah pada ruang kelas, yaitu seorang “guru”. Guru, atau mentor, adalah ujung tombak dalam proses Pendidikan atau pembelajaran. Di daerah 3T, di mana sumber belajar lain sangat terbatas, peran guru menjadi lebih dari sekadar pengajar. Mereka adalah pembentuk karakter, motivator, dan juga menjadi jembatan antara siswa dengan dunia luar. Program Guru Garis Depan (GGD) merupakan salah satu hal yang diupayakan pemerintah untuk menjawab tantangan ini, dengan harapan kehadiran guru-guru berdedikasi dapat menjadi motor penggerak sekolah efektif di wilayah yang memiliki akses yang terbatas (Rivalina, 2016). Akan tetapi, tantangan yang dihadapi para guru ini sangat besar, mulai dari masalah kesejahteraan, distribusi yang tidak merata, hingga kompetensi yang perlu terus ditingkatkan (Rahmawati, 2022). Revitalisasi dan optimalisasi peran guru menjadi tenaga pendidik yang kreatif dan juga inovatif di tengah keterbatasan yang ada menjadi salah satu kunci agar pengelolaan kelas dan transfer nilai-nilai (pembelajaran) kebangsaan dapat terselenggara secara optimal (Vania et al., 2021).

Tantangan ini diperumit dengan adanya era Revolusi Industri 4.0. Dimana pada era revolusi ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menawarkan potensi luar biasa untuk mengatasi hambatan geografis dan keterbatasan sumber belajar. Model pembelajaran terintegrasi TIK, jika diterapkan dengan tepat, dapat membuka akses terhadap materi ajar yang lebih kaya dan variasi metode pembelajaran yang lebih interaktif (Siahaan, 2018). Namun, di sisi lain, kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan daerah 3T justru semakin melebar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sekolah di daerah 3T belum tersentuh TIK karena ketiadaan sumber tenaga listrik, sulitnya akses internet, dan perangkat yang kurang bahkan tidak memadai. Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks, dimana teknologi yang seharusnya menjadi solusi pemerataan, justru berpotensi memperlebar ketimpangan antara daerah dengan daerah lainnya jika infrastruktur dan kesiapan SDM tidak dibangun secara merata. Beranjak dari realitas dan fakta di lapangan inilah yang menjadi latar belakang utama penelitian ini. Meskipun PKn secara teori memiliki fungsi yang sangat penting, pada praktiknya cara pengajarannya di sekolah seringkali belum sesuai harapan, karena dihipnotis oleh berbagai problematika. Mulai dari tantangan geografis, keterbatasan peran dan kapasitas guru, hingga jurang digital yang terbuka lebar. Latar belakang inilah yang mendorong penulis untuk melakukan observasi mendalam melalui studi literatur mengenai kondisi riil pembelajaran PKn di daerah 3T. Penelitian ini memiliki celah kebaruan (*gap analysis*) dengan tidak hanya memetakan masalah-masalah yang ada, tetapi juga berupaya mensintesis berbagai temuan untuk merumuskan strategi-strategi pembelajaran yang inovatif serta kontekstual dan dapat diimplementasikan di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1.	(Putra et al., 2019)	Analisis Penerapan Model dan Metode Pembelajaran Tepat Guna pada Daerah 3T di Kabupaten Mahakam Ulu	Analisis penerapan model pembelajaran yang digunakan di daerah itu.	Kualitatif, Deskriptif	Guru telah mencoba menerapkan CTL, PAIKEM, dan <i>Discovery Learning</i> . Tetapi ada kendala fasilitas dan pemahaman konsep yang belum dalam.

2.	(Hasanah et al., 2020)	Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Daerah Tertinggal	Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi guru dan siswa dalam pembelajaran PPKn di Nias Utara.	Kualitatif, Deskriptif	menemukan bahwa guru belum menyiapkan RPP dan pembelajaran masih monoton karena minimnya fasilitas dan koordinasi
3.	(Rivalina, 2016)	Peran Guru Garis Depan dalam Mengembangkan Sekolah Efektif	Menganalisis peran GGD dalam mengembangkan sekolah menjadi Sekolah Efektif di Aceh Timur.	Deskriptif Kualitatif	GGD dibutuhkan untuk atasi masalah Pendidikan dengan optimalisasi peran guru.
4.	(Siahaan, 2018)	Perintisan Model Pembelajaran Terintegrasi TIK di Daerah 3T	Mendeskripsikan pelaksanaan perintisan model pembelajaran terintegrasi TIK oleh guru di daerah 3T.	Studi literatur	dapat menerapkan model pembelajaran terintegrasi TIK meskipun dalam kondisi terbatas

Berdasarkan pemetaan di atas, terlihat bahwa penelitian sebelumnya telah banyak mengidentifikasi masalah yang berhubungan dan secara garis besar, baik dari segi metode pembelajaran (Putra et al., 2019), peran guru secara umum (Rivalina, 2016), maupun implementasi TIK (Siahaan, 2018). Namun, belum banyak penelitian yang mencoba mensintesis berbagai temuan tersebut untuk menawarkan sebuah kerangka strategi inovatif yang utuh dan spesifik untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di daerah 3T. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji kondisi pembelajaran PKN dan merumuskan rekomendasi strategi pembelajaran yang efektif serta aplikatif berdasarkan tinjauan literatur yang komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*literature review*). Metode ini dipilih karena penelitian tidak melakukan pengambilan data primer secara langsung di lapangan, melainkan berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber data yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan (Undang-Undang dan Peraturan Presiden), buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta artikel-artikel dari jurnal ilmiah nasional yang telah dipublikasikan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antar konsep untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap sumber literatur yang sudah di telaah, ditemukan beberapa tema problematika utama yang secara konsisten muncul dalam pembelajaran dan penyebearluasan pendidikan, khususnya PKN, di daerah 3T. Berikut adalah detail dari problematika tersebut:

1. Problematika pada Tenaga Pendidik (Guru): Faktor guru menjadi variabel kunci yang paling sering di analisis. Masalah ini mencakup tiga hal utama:
 - a. Kuantitas dan Distribusi: Terjadi ketimpangan distribusi guru antara wilayah perkotaan dengan daerah 3T, yang mengakibatkan kekurangan guru secara signifikan (Rahmawati, 2022). Kondisi ini yang membuat suatu sekolah terkait harus sarimenerapkan Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR), di mana satu guru harus mengajar beberapa tingkatan kelas secara bersamaan dalam satu ruangan (Vania et al., 2021).
 - b. Kualitas dan Kompetensi: Banyak guru di daerah 3T yang memiliki kualifikasi di bawah standar atau mengajar tidak sesuai dengan latar belakang Pendidikannya (*mismatch*).

Tidak hanya itu, keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesi berkelanjutan membuat kompetensi guru sulit berkembang (Vania et al., 2021).

- c. Metode Mengajar: Metode pembelajaran yang digunakan masih cenderung monoton dan berpusat pada guru (*teacher-centered*), seperti metode ceramah, monolog, yang menyebabkan rendahnya minat dan partisipasi aktif siswa karena tidak adanya interaksi secara dialog (Hasanah et al., 2020).
2. Keterbatasan Fasilitas Sarana Prasarana dan Media Pembelajaran: Kondisi infrastruktur pendidikan di daerah 3T sangat kurang layak dan tidak maksimal. Banyak sekolah memiliki bangunan yang rusak, kekurangan ruang kelas, dan tidak memiliki perpustakaan yang layak (Ayudhia Nur Luthfia et al., 2023). Ketiadaan listrik dan akses internet juga menjadi kendala signifikan. Sehingga menghambat pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran modern, dimana membutuhkan akses internet untuk dapat menggunakannya. Keterbatasan ini memaksa guru untuk mengandalkan media seadanya, yang seringkali tidak cukup efektif untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak dalam PKN.
3. Tantangan Kurikulum dan Kontekstualisasi Materi: Meskipun kurikulum nasional dirancang untuk diterapkan di seluruh Indonesia, penerapannya di daerah 3T seringkali mengalami kendala yang serius. Materi ajar dalam buku teks terkadang terasa "jauh" dan kurang relevan dengan realitas kehidupan sosial budaya siswa pada daerah 3T, sehingga menyulitkan guru dalam melakukan penerapan pembelajaran dengan kondisi rilnya (Ayudhia Nur Luthfia et al., 2023).

Pembahasan

Untuk menganalisis temuan di atas secara lebih mendalam dan merumuskan solusi yang relevan, digunakan salah satu pendekatan analisis, yaitu dengan metode 5W+1H (*What, Why, Who, Where, When, How*).

1. **WHAT** (Apa Masalah Utamanya?): Yang menjadi masalah utama pada kasus ini adalah tidak optimalnya proses dan hasil pembelajaran PKN di daerah 3T, yang berisiko pada lemahnya serta kurangnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda di garda terdepan negara. Ini bukan sekadar masalah teknis pendidikan, tetapi masalah ketahanan skala nasional.
2. **WHY** (Mengapa Ini Terjadi?): Akar masalah kasus ini bersifat multifaktorial dan sistemik. Ini terjadi karena ketimpangan kebijakan pembangunan yang berpusat di perkotaan, sulitnya kondisi geografis, serta kurangnya insentif dan dukungan yang memadai bagi tenaga pendidik atau guru yang bersedia mengabdikan diri di daerah 3T (Rahmawati, 2022).
3. **WHO & WHERE** (Siapa dan Di Mana yang Terdampak?): Yang paling terdampak pada kasus ini adalah siswa atau para pelajar di ratusan kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di seluruh Indonesia, dari Nias hingga Mahakam Ulu (Hasanah et al., 2020; *Perpres Nomor 63 Tahun 2020*, n.d.; Putra et al., 2019). Selain itu, guru juga menjadi korban dari sistem yang belum berpihak dan sesuai dengan mereka.
4. **WHEN** (Kapan Dampaknya Paling Terasa?): Dampaknya terasa secara terus-menerus, namun akan menjadi kritis ketika generasi muda dari daerah 3T ini tumbuh dewasa dengan pemahaman kebangsaan yang tidak maksimal. Di era globalisasi saat ini, di mana batas-batas negara semakin kabur, lemahnya wawasan kebangsaan di wilayah perbatasan dapat menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara Indonesia (Nurgiansah & Rachman, 2022).
5. **HOW** (Bagaimana Solusinya?): Berdasarkan analisis literatur, solusi tidak bisa bersifat tunggal atau hanya dengan satu hal saja, melainkan harus berupa strategi inovatif yang terintegrasi, baik di tingkat kebijakan maupun praktik di lapangannya.

1. Optimalisasi Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) secara Kreatif: Alih-alih melihat PKR sebagai masalah, guru perlu dibekali strategi untuk mengelolanya secara efektif. Model PKR 221 (2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan) atau 222 (2 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruangan) dapat diterapkan dengan lebih terstruktur. Dalam konteks PKn, guru bisa menggunakan metode tutor sebaya, maksudnya adalah siswa kelas yang lebih tinggi membantu mengajar siswa kelas di bawahnya mengenai materi kebangsaan atau Pendidikan sejenisnya, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan (Vania et al., 2021).
2. Penerapan *Contextual Teaching and Learning* (CTL): Model ini sangat relevan untuk mengatasi masalah materi ajar yang kurang kontekstual atau kurang praktis. CTL menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa (Putra et al., 2019). Dalam Pendidikan PKn, guru bisa mengajak siswa bersama-sama mengobservasi praktik gotong royong di desa mereka sebagai contoh nyata pengamalan Pancasila, atau membahas aturan adat setempat sebagai bagian dari norma hukum yang berlaku pada lingkungan masyarakat sekitar mereka.
3. Menerapkan Metode *Story Telling* (Bercerita): Di tengah keterbatasan media, *story telling* adalah salah satu metode yang sangat kuat, murah, dan efektif, dan efisien untuk pendidikan karakter (Khanifah, 2020). Guru dapat menceritakan kisah-kisah kepahlawanan pahlawan nasional maupun pahlawan lokal dari daerah tersebut. Metode ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan emosional siswa atau pelajar. Sehingga nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air dapat terinternalisasi dan dapat lebih mudah dipelajari dengan lebih mendalam.

KESIMPULAN

Pembeajaran dan pematerian Pendidikan Kewarganegaraan di daerah 3T menghadapi tantangan variatif yang berpusat pada masalah ketimpangan distribusi serta kualitas guru, keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana, serta kesulitan dalam kontekstualisasi atau visualisasi materi ajar Pendidikan pancasila. Permasalahan yang ada ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan utama PKn, yaitu membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila dan memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh. Namun, berbagai keterbatasan tersebut dapat diatasi melalui penerapan strategi-strategi pembelajaran inovatif. Penelitian ini merekomendasikan tiga strategi utama: optimalisasi Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) yang memberdayakan siswa, penerapan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) yang mendekatkan materi dengan realitas siswa, serta penggunaan metode *story telling* yang kuat dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak adanya pengambilan data primer dari lapangan sehingga temuan sepenuhnya bergantung pada literatur yang tersedia. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lapangan secara langsung untuk menguji efektivitas dari strategi-strategi yang direkomendasikan dalam artikel ini. Pada akhirnya, memastikan kualitas pendidikan PKn di daerah 3T bukanlah semata-mata tanggung jawab guru di lapangan. Ini adalah sebuah panggilan dan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh pemerintah pusat melalui kebijakan yang adil, pemerintah daerah melalui dukungan yang konkret, dan seluruh elemen masyarakat. Membangun nasionalisme dari pinggiran adalah investasi terbaik untuk masa depan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ayudhia Nur Luthfia, Nabila Putri Wahiddiyah, Desy Safitri, & Sujarwo Sujarwo. (2023). Analisis Problematika Pendidikan Indonesia Di Wilayah 3T. *Guruku: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 36–46. <https://doi.org/10.59061/guruku.v1i4.491>

- Hasanah, A., Indrawadi, J., & Montessori, M. (2020). Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Daerah Tertinggal. *Journal of Moral and Civic Education*, 4(2), 69–77. <https://doi.org/10.24036/8851412412020223>
- Ismail, H., Ramadhanty, H. V., Rizky, M., & Nurgiansah, T. H. (2024). *Wawasan Nusantara: Dasar Pemikiran, Penerapan, dan Analisis Contoh Kasus*. 1(1).
- Khanifah, S. (2020). Story Telling Sebagai Media Pendidikan Karakter Kebangsaan Di Daerah 3T. *Jurnal Ilmiah WUNY*, 2(1). <https://doi.org/10.21831/jwuny.v2i1.30946>
- Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2022). Nasionalisme Warga Muda Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(1), 66. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33214>
- Permendesa Nomor 11 Tahun 2020. (n.d.).
- Perpres Nomor 63 Tahun 2020. (n.d.).
- Pradita, T. N. (2017). *Sikap Patriotisme Bagi Warga Negara Di Daerah 3t*. 1(2).
- Putra, M. T. F., Arianti, A., & Elbadiansyah, E. (2019). Analisis Penerapan Model Dan Metode Pembelajaran Tepat Guna Pada Daerah 3t (Terdepan, Terpencil Dan Tertinggal) Di Kabupaten Mahakam Ulu. *Sebatik*, 23(2), 317–323. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v23i2.776>
- Rahmawati, A. P. (2022). Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) Sebagai Sistem Penyebaran Guru Untuk Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah 3T. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, 5(2), 293. <https://doi.org/10.20961/shes.v5i2.59337>
- Rivalina, R. (2016). Peran Guru Garis Depan Dalam Mengembangkan Sekolah Efektif. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 30(2), 77–86. <https://doi.org/10.21009/Pip.302.2>
- Siahaan, S. (2018). Perintisan Model Pembelajaran Terintegrasi Tik Di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal, Dan Perbatasan. *Jurnal Teknodik*, 171–185. <https://doi.org/10.32550/Teknodik.V0i0.459>
- Uu No.43 Th 2008. (N.D.).
- Vania, A. S., Septianingrum, A. D., Suhandi, A. M., & Prihantini, P. (2021). Revitalisasi Peran Guru Dalam Pengelolaan Kelas Di Daerah Terdepan, Terluar, Dan Tertinggal (3t) Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5142–5150. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1587>
- Vega, A. (2024). *Kesetaraan Akses Pendidikan: Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Di Indonesia*. 1(2).